

ABSTRAK

Kelangkaan sumber energi yang tak terbarukan seperti minyak bumi dan gas alam telah menimbulkan prediksi terjadinya perubahan peta konflik dunia pada masa depan. Konflik yang pada awalnya berlatar belakang penguasaan energi di negara-negara yang memiliki sumber energi fosil, berubah dengan hadirnya motif penguasaan sumber pangan, air bersih, dan energi hayati. Dengan demikian, secara geopolitik wilayah konflik akan bergeser dari wilayah nonekuator ke wilayah ekuator. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan ekuator, rawan akan ancaman berupa berbagai konflik penguasaan kekayaan sumber energi hayati, pangan, dan air sebagai sumber energi masa depan. Penguasaan terhadap suatu negara kini lebih bersifat perang *proxy*. Untuk itu, peningkatan kualitas profesionalisme perwira TNI AD harus diarahkan pada peningkatan kualitas pembinaan personel dengan menempatkan personel perwira sebagai aset organisasi melalui penerapan sistem pembinaan personel sebagai *human capital*

Kata kunci: sumber energi, ekuator, perang *proxy*, *human capital*

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis saat ini hingga 20 tahun ke depan masih memperlihatkan bahwa konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia hampir 70% bersumber dari persaingan kepentingan antarnegara dalam memenuhi kebutuhannya akan sumber energi, terutama minyak bumi dan gas alam yang berasal dari sumber energi fosil tidak terbarukan. Namun, seiring dengan adanya berbagai hasil penelitian para pakar yang memunculkan data dan fakta mengenai habisnya sumber energi fosil tidak terbarukan, dan satu-satunya harapan yang tersisa ialah mulai menciptakan energi baru sebagai pengganti energi fosil dengan memanfaatkan sumber daya hayati yang dikenal dengan istilah bio energi.

Kondisi tersebut menimbulkan prediksi terjadinya perubahan peta konflik dunia pada masa depan. Konflik yang pada awalnya berlatar belakang penguasaan energi fosil di

negara-negara yang memiliki sumber energi fosil, pada masa depan akan berubah dengan motif penguasaan sumber pangan, air bersih, dan energi hayati. Sementara itu, Thomas Malthus seorang pakar demografi dan ekonomi politik dari Inggris dalam teorinya tentang prinsip kependudukan, mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dunia jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Akibatnya, pada suatu masa akan terdapat suatu permasalahan di mana meledaknya jumlah penduduk tidak diikuti dengan ketersediaan bahan pangan.

Kelangkaan pangan tersebut, akan semakin parah dengan adanya ketergantungan kebutuhan energi yang harus dipasok dari sumber daya hayati. Kecenderungan situasi itu mulai dapat dirasakan pada 2007-2008, ketika pengalihan bahan pangan untuk penggunaan bioenergi telah memicu krisis harga pangan dunia yang meningkat tajam hingga 75% yang pada akhirnya akan memperparah kelangkaan bahan pangan dunia. Dengan demikian, secara geopolitik

wilayah konflik akan bergeser dari wilayah nonekuator. Hal tersebut didasarkan pada perkiraan bahwa pada 2039 jumlah penduduk dunia akan mencapai 11,6 miliar, dan sekitar 80,2% atau 9,2 miliar dari jumlah tersebut berada di wilayah nonekuator dan kebutuhan hidupnya terhadap pangan, air, dan energi akan bergantung pada wilayah ekuator.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan ekuator yang menjadikannya memiliki berbagai kelebihan, seperti iklim tropis, disinari matahari sepanjang tahun, mengalami dua kali pergantian musim kemarau dan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, tanah yang subur, flora dan fauna yang beranekaragam, sumber daya alam yang melimpah, dan kaya akan sumber energi hayati. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia negara dengan sumber energi masa depan yang melimpah dan membuat banyak pihak asing memiliki kepentingan untuk dapat menguasai Indonesia. Hal itu menjadikan

Indonesia rawan akan berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan kepentingannya, pihak-pihak asing menggunakan berbagai cara dengan menimbulkan berbagai konflik agar dapat menguasai kekayaan sumber energi hayati, pangan, dan air yang mereka butuhkan. Kecenderungan pola konflik saat itu mengalami perubahan secara signifikan. Pola yang digunakan tidak lagi bersifat frontal, tetapi dilakukan secara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat perang *proxy*.

Penguasaan terhadap suatu negara kini tidak lagi menggunakan cara konvensional, tetapi menggunakan “senjata” berupa berbagai

isu dengan pola konflik yang cenderung asimetris dan dibangun secara sistematis melalui tahapan yang terencana dengan tema ekonomi, sosial politik, pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, demokratisasi, korupsi yang mengemuka, lingkungan hidup, termasuk penggantian rezim yang otoriter, isu senjata pemusnah massal, serta perbedaan agama, sekte, suku, ras, dan antargolongan. Penyebaran isu diciptakan melalui propaganda dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, termasuk jejaring media sosial.

Berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI tersebut, merupakan suatu tantangan bagi TNI sebagai benteng pertahanan negara. Walaupun prediksi kekuatan pertahanan negara masa depan ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi secara militer negara juga harus kuat. Kekuatan militer itu meliputi sumber daya manusia, alutsista, strategi, hingga sistem pendidikan. Kualitas profesionalisme sumber daya manusia yang andal menjadi unsur utama dalam membentuk kekuatan militer sebagai pertahanan suatu negara. Untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis tersebut, peningkatan kualitas profesionalisme sumber daya manusia harus diarahkan pada pembinaan personel perwira sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan guna menghadapi berbagai konflik atau perang masa depan yang bersifat perang *proxy*. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pembinaan personel tidak lagi hanya memandang personel sebagai sumber daya (*human resources*), tetapi mulai mengarah pada pengembangan konsep yang memandang personel sebagai aset atau modal (*human capital*) sehingga personel dianggap sebagai bagian dari



alat dan strategi keberhasilan suatu organisasi. TNI AD sebagai bagian dari TNI, sesuai dengan perkembangan organisasi dan tuntutan tugas, perlu menjawab tantangan tersebut melalui peningkatan kualitas pembinaan personel dengan menempatkan personel perwira sebagai aset organisasi melalui penerapan sistem pembinaan personel sebagai *human capital*.

ANCAMAN PERANG "PROXY" DI INDONESIA

Dalam berbagai kesempatan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah mengingatkan tentang adanya berbagai indikasi ancaman perang *proxy* di Indonesia, sebagai dampak keberadaan

Indonesia di kawasan ekuator. Menurut dia, telah banyak cara dilakukan negara asing menguasai kekayaan alam Indonesia, salah satunya dengan cara menciptakan perang *proxy*. Perang *proxy* didefinisikan sebagai sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, tetapi kadang bisa juga aktor nonnegara (*nonstate actor*) yang berwujud Lembaga Sosial masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas), kelompok masyarakat, dan perseorangan. Secara singkat, perang *proxy* merupakan kepanjangan tangan

dari sebuah negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, tetapi menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah.

Berdasarkan hasil diskusi akademis dari 25 universitas di seluruh Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, dan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan TNI menyatakan bahwa perang *proxy* dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia. Dalam kondisi nyata, dapat kita lihat contoh dan indikasi perang *proxy* di Indonesia yang menyusup dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai peristiwa berikut ini:

1. Gerakan separatis. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai dengan munculnya referendum.
2. Demonstrasi massa. Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstran yang tidak tahu apa yang akan diperjuangkan dalam demonstrasi itu.
3. Penerapan regulasi yang merugikan. Sebagai contoh ialah peraturan regulasi produk perjanjian internasional yang diterbitkan atas prakarsa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Amerika Serikat, yakni Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Regulasi itu menggunakan label kesehatan sebagai dalih pengaturan tembakau secara internasional. Namun, kenyataannya materi FCTC lebih banyak mengatur tata niaga sehingga aturan itu menekan semua

negara dan melemahkan usaha tembakau dalam negerinya dengan alasan kesehatan. Di Indonesia, peraturan ini mematikan industri rokok kretek dan menjadikan usaha industri rumahan gulung tikar.

4. Peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan perang *proxy*, dengan tujuan merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia pada masa depan tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi.

5. Bentrok antar kelompok.

Perkelahian dan aksi anarkistis antarpelajar SD, SMP, dan SMA, bahkan mahasiswa, menunjukkan bahwa bidang pendidikan dan generasi muda, tidak terlepas dari aksi perang *proxy* itu sendiri.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, pembinaan personel harus diarahkan kepada personel sebagai *brain ware* yang berada pada tingkatan pengambil keputusan dan memegang peran kunci yang dianggap sebagai aset organisasi. Dengan demikian, personel tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga mampu menciptakan nilai kreativitas dan inovasi untuk kemajuan organisasi.

PEMBINAAN PROFESIONALISME PERWIRA TNI AD SEBAGAI "HUMAN CAPITAL"

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara. Sementara Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas pokok TNI ialah menegakkan

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Keutuhan bangsa dan negara harus dijaga melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu jati diri prajurit TNI ialah tentara profesional yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, dijamin kesejahteraan, dan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sesuai dengan tuntutan undang-undang tersebut, dibutuhkan kebijakan pengembangan pembinaan profesionalisme personel TNI AD yang bersifat strategis dan berkesinambungan dalam jangka panjang yang dapat menjawab tantangan tugas ke depan.

Sementara itu, seiring dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, era manusia sebagai sumber daya (*human resources*) perlahan mulai tergeser dengan paradigma baru, yaitu manusia sebagai modal (*human capital*). Pada penerapan konsep *human capital* (modal manusia), manusia tidak lagi menjadi objek. Manusia adalah subjek yang harus dikelola seperti layaknya mengelola modal dan peningkatan kompetensi manusia didasarkan pada analisis talenta.

Pada *human capital*, manusia perlu dicari terlebih dahulu talentanya dan kemudian diberi pelatihan yang mengacu pada talenta yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi manusia dikembangkan berdasarkan talentanya, sehingga

talenta yang dimilikinya termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan talenta yang dimilikinya, ditempatkanlah manusia di jabatan/posisi kerja yang sesuai, atau dikenal dengan istilah *the right man on the right place/job*. Bila terjadi hal seperti itu, secara otomatis organisasi akan meningkat kapabilitasnya. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap manusia, harus dicari benang merahnya, hasil apa yang akan ditingkatkan dengan tindakan tersebut sehingga tidak menjadi pemborosan yang sia-sia.



Konsep *human capital* itu sendiri secara harfiah ialah pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) yang menjadikan manusia (personel) sebagai aset atau modal suatu organisasi. Jika suatu organisasi memperlakukan personel sebagai modal, organisasi tersebut akan mendapat keuntungan karena personel dapat menjalankan sumber-sumber daya lainnya. Dalam *human capital*, personel identik dengan akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan personel lainnya yang relevan di dalam kekuatan personel yang

dimiliki sebuah organisasi dan dapat memacu produktivitas, kinerja, serta pencapaian tujuan strategis. Menurut Mayo, *human capital* memiliki lima komponen yang meliputi *individual capability* (kemampuan individual), *individual motivation* (motivasi individual), *leadership* (kepemimpinan), *the organizational climate* (suasana organisasi), dan *workgroup effectiveness* (efektivitas kelompok kerja).

Sementara itu, pembinaan perwira TNI AD merupakan pembinaan terhadap manusia secara individu yang penyelenggaraannya dimulai sejak diterima sebagai prajurit TNI AD sampai dengan berakhirnya masa dinas yang bersangkutan. Pembinaan dilaksanakan melalui tahapan, penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, penyaluran, dan pemisahan. Salah satu tahapan yang sangat menentukan profesionalisme personel perwira adalah pendidikan. Sebagaimana diamanatkan undang-undang tentang jati diri TNI, salah satunya adalah sebagai tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dan diperlengkapi secara baik. Proses pendidikan personel perwira TNI AD dilaksanakan sebagai salah satu tahapan pembinaan perwira untuk membentuk dan mengembangkan kualitas calon prajurit dan prajurit TNIAD yang berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, memiliki kepribadian sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan jasmani agar mampu mengemban tugas sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Untuk itu, sejalan dengan perubahan paradigma pengembangan sumber daya manusia, tahapan pendidikan dan pembinaan profesionalisme perwira TNI AD, sudah saatnya dilaksanakan dengan memperlakukan personel sebagai *human*

capital secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga personel senantiasa dilihat sebagai aset yang dapat ditingkatkan terus nilainya. Pembinaan profesionalisme perwira TNI AD sebagai *human capital* harus bertitik tolak dari apa yang dimiliki oleh personel itu sendiri sebagai aset atau modal organisasi yaitu pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Tuntutan profesionalisme senantiasa terkait dengan visi organisasi dan kompetensi yang harus dimiliki setiap personel, atau yang dikenal dengan istilah kompetensi profesional (*professional competence*) dan menjadi acuan global masyarakat dunia usaha ataupun organisasi publik. Kompetensi profesional merupakan ciri individu yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme di segala bidang. Setiap individu harus mumpuni dalam bidangnya, memiliki sikap mental siap berkembang dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, mampu mengelola konflik, dan punya kapasitas yang dapat diandalkan. Seorang yang memiliki kompetensi profesional sangat memahami proses organisasi, mengelola ide-ide inovatif dari bawahannya ataupun rekan kerja, siap bekerja sama dengan integritas tinggi, dan senantiasa siap belajar terhadap hal-hal baru sesuai dengan tuntutan tugas.

Robert K. Cooper mengatakan bahwa seorang profesional harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga pandai memotivasi diri sendiri dan orang lain, mempunyai kompetensi inti (*basic competence*) dan selalu berorientasi pada kemajuan. Sementara Meyer dan Donaho menyatakan seseorang dapat dikatakan profesional bila ia menguasai bidangnya, kompeten, dan siap menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan demikian, ia bukan saja menguasai ilmu pengetahuan

tertentu, tetapi juga siap mempelajari ilmu-ilmu baru, dan terutama siap mengimplementasikan konsep teoretis yang dikuasainya.

Hal tersebut sejalan dengan visi TNI AD, yakni menjadikan TNI AD sebagai tentara yang solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat, dengan cara:

1. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan jajaran TNI AD yang profesional dan modern.
2. Meningkatkan dan memperkuat jati diri prajurit TNI AD yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban, dan pantang menyerah.
3. Mewujudkan kualitas prajurit TNI AD yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan yang sistematis, serta untuk meningkatkan kesejahteraannya.
4. Mewujudkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat, baik dalam rangka confidence building measures (CBM) maupun dalam upaya meningkatkan profesionalisme prajurit.
5. Mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI AD dalam upaya pertahanan negara.

Berdasarkan teori-teori dan visi TNI AD tersebut, serta tantangan dan ancaman yang dihadapi, pembinaan profesionalisme perwira TNI AD harus didasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kompetensi inti. Seorang perwira dituntut memiliki kemampuan nyata yang secara spesifik dapat diandalkan untuk mendukung visi dan misi organisasi. Untuk menjadi perwira profesional yang andal, seseorang harus memiliki fleksibilitas

tinggi tetapi tetap memiliki kompetensi inti.

2. *Attitude* (sikap mental yang baik). Seorang perwira harus memiliki kecerdasan emosional, mampu mengelola konflik, dapat bekerja sama dalam tim, siap beradaptasi, serta memiliki dimensi psikologis lainnya sehingga siap dan mampu menghadapi berbagai tantangan tugas yang kompleks.

3. Kemampuan manajerial. Walaupun misalnya bukan seorang manajer, dia memiliki kemampuan dalam perencanaan, sistem evaluasi, dan siap melakukan inovasi-inovasi untuk kemajuan organisasi.

4. Integritas pribadi atau kejujuran profesional.

5. Sikap (*attitude*) ataupun perilaku (*behaviour*) ingin maju dan selalu belajar. Senantiasa memiliki prinsip dan perilaku sesuai dengan standar kerja profesional, konsisten antara sikap dan perilaku, selalu siap belajar, adaptif, dan memiliki dorongan yang tinggi untuk maju.

6. Kesamaptaaan jasmani. Seorang perwira dituntut senantiasa menjaga kesamaptaannya dengan tingkat disiplin yang tinggi sehingga selalu siap melaksanakan tugas.

Untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme perwira TNI AD, harus dilakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi. Skala pengukuran dilakukan dengan mengonseptualisasi sistem manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, dan beberapa indikator profesionalisme yang telah ditetapkan. Untuk mendukung upaya pengukuran sikap dan perilaku profesional, dapat digunakan skala

pengukuran sikap dan perilaku yang didasarkan pada Skala Likert yang biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, dan perilaku yang banyak digunakan dalam berbagai survei, konstruksi tes, penyusunan skala prestasi dan skala sikap, serta psikodiagnostik.

Kebijakan pengembangan profesionalisme perwira TNI AD sebagai *human capital* dan berbasis kompetensi itu harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan melalui pola pendidikan perwira dengan melihat kompetensi dan *human capital* yang dimilikinya dengan didasarkan pada penugasan, serta tingkat jabatan dan kualifikasinya. Dengan cara demikian diharapkan setiap personel bukan saja mampu memberikan nilai tambah secara strategis kepada organisasi, tetapi juga mampu menciptakan nilai untuk lebih berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Melalui penerapan indikator-indikator tersebut, profesionalisme seorang perwira dibentuk untuk menjadi seorang tentara profesional yang merupakan perpaduan *skills* dan *knowledge* sesuai dengan konsep *human capital*, tanpa melupakan jati diri yang lainnya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional.

Dengan penggabungan kemampuan tersebut, perwira TNI AD akan memiliki karakter kompeten, kredibel, dan kreatif sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, dapat menjadi bagian dari solusi serta menjadi pengambil keputusan (*decision maker*) yang andal dalam menghadapi tantangan dan ancaman saat ini dan masa mendatang, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nonmiliter, terutama yang bersifat perang *proxy*. Dengan demikian, visi TNI AD sebagai tentara yang solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- CHR. Jimmy L. Gaol. 2014. *A to Z Human Capital: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Focusindo Mandiri. 2010. *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. Bandung: Focusindo Mandiri.
- Gatot Nurmantyo. 2014. *Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Indonesia Emas*. Jakarta: Mabes TNI AD.
- , 2014. *Peran Pemuda Dalam Menghadapi "Proxy War"*. Jakarta: Mabes TNI AD.
- H.M. Nugroho Dwi P. 2015. *Human Capital Management PT Pelindo III: Panduan Manajemen Kinerja SDM dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Mabes TNI AD. 2014. *Petunjuk Induk tentang Personel*. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Syarifudin Tippe. 2012. *Human Capital Management: Model Pengembangan Organisasi Militer di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, Gramedia.

BIODATA PENULIS



Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, S.E. dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Agustus 1960. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang saat ini menjabat sebagai Komandan Sesko TNI sejak Juli 2015 hingga saat ini. Alumnus Akademi Militer tahun 1984, Seskoad (1998), Sesko TNI (2004), dan alumnus Lemhannas (2009) ini berasal dari Kecabangan Infanteri dan cukup lama berkarier di Kopassus.

Riwayat jabatan yang pernah dijabat beliau adalah Danton Kopassandha Kopassus (1984), Danton 2/122 Grup 1 Kopassus, Dan Unit Grup 1 Kopassus, Pgs. Pamen Waslat Puslatsus Grup 3 Kopassus, Dansatdiksandha Sussandha Kopassus, Kasipam Grup 3 Pusdikpassus Kopassus, Wadanyon 21 Grup 2 Kopassus, Pamen Kopassus (Seskoad), Danyonif 202/TM Kodam Jaya, Kasiops Rem 051/WKT Kodam Jaya, Dandim 0507/bks rem 051/WKT Dam Jaya Pamen Mabes TNI, Wadan Grup A Paspampres, Waasop Paspampres, Dangrup A Paspampres, Danrem 061/SK Kodam III/SLW, Kasidivf 1 Kostrad, Wadanjen Kopassus, Danpaspampres, Danjen Kopassus, Pangdam Jaya, Dankodiklat TNI AD, dan pada tahun 2016 dipercaya oleh pimpinan TNI AD sebagai Dansesko TNI .

ASET TNI AD YANG TIDAK BERWUJUD

Oleh Kolonel Czi Drs. Burlian Sjafei

*"Militansi diwujudkan dengan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan,
mengamalkan Pancasila, menjiwai
Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan
Delapan Wajib TNI"*



PENDAHULUAN

Menelusuri tahun demi tahun pada abad ke-21 ini, persaingan di semua sektor semakin ketat. Untuk menghadapinya, setiap organisasi, baik sektor privat maupun publik, harus memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) tertentu dibandingkan dengan organisasi lainnya. Keunggulan itu dapat dibentuk melalui berbagai cara, seperti menciptakan produk dengan desain yang unik, penggunaan teknologi modern, desain organisasi, dan yang terpenting ialah manajemen sumber daya manusia (SDM) secara efektif. Produk yang dimaksud itu tentunya tidak hanya berupa barang yang tampak (*tangible*), tetapi juga jasa atau layanan yang tak tampak (*intangible*).

Khusus dalam konteks manajemen SDM, pimpinan perlu meningkatkan berbagai potensi SDM agar mampu memberdayakannya secara optimal dalam mencapai kinerja terbaik. Dengan demikian, SDM yang berkualitas akan mampu mendudukkan organisasi pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lainnya. Pengembangan SDM pada hakikatnya adalah investasi. Konsep modal manusia (*human capital*) berkaitan dengan nilai tambah personal yang diberikan kepada organisasi.

Chatzkel (2004) mengatakan bahwa “modal manusia itu merupakan pembeda sebuah organisasi dalam konteks keunggulan kompetitif.” Dalam konsepnya, pekerja adalah penjelmaan seperangkat keterampilan yang dapat “disewakan” kepada majikan. Pengetahuan dan keterampilan pekerja berasal dari pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang menghasilkan pengalaman akan memiliki andil tertentu, termasuk dalam bentuk modal keterampilan produktif. Modal manusia merupakan elemen penting dari aset tidak berwujud dalam organisasi. Pentingnya aset manusia dapat dijelaskan dengan pertanyaan, mengapa sangat penting untuk mengukur nilai mereka, seberapa baik mereka dimanfaatkan, dan apa yang perlu dilakukan untuk mengelola mereka secara lebih efektif? Dinamika perkembangan

lingkungan strategis saat ini berpengaruh besar terhadap sumber daya manusia Indonesia. Di tingkat nasional, kita memiliki masalah dengan masuknya berbagai kepentingan asing di negeri kita karena letak Indonesia yang strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah. Neoliberalisme dan neokapitalisme yang masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia telah menimbulkan dan menyuburkan “neofeodalisme” sehingga telah memacu perilaku berburu kekuasaan (*power-oriented*). Amendemen UUD 45 telah menimbulkan distorsi dan menjauh dari spirit dasarnya, terutama perubahan pada pasal 30 telah menyebabkan melemahnya semangat penyelenggaraan hankam, serta berdampak pada

semangat personel, dan adanya upaya pelemahan institusi TNI secara sistematis, karena ingin menonjolkan supremasi sipil sehingga sampai sekarang Indonesia tidak memiliki *deterrent power*.

Perkembangan situasi dan kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi TNI AD ke depan untuk menyikapinya dalam rangka menjalankan tugas pokok, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk menjalankan tugas pokok

tersebut, yang menjadi modal utama kekuatan ialah militansi prajurit TNI AD, yakni semangat tak kenal menyerah, semangat rela berkorban, tahan menderita, percaya pada kekuatan diri sendiri, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Perkembangan lingkungan strategis yang ada saat ini akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan utama TNI AD, yakni militansi prajurit.

Militansi prajurit TNI AD merupakan elemen penting dari aset yang tidak berwujud (*intangible*) pada organisasi TNI AD. Aset itu merupakan kekayaan institusi yang harus selalu dipelihara dan ditingkatkan. Militansi sangat penting dan merupakan modal utama untuk dapat mengantarkan prajurit menjadi tentara profesional. Hal itu mengingat bahwa daya tempur tidak semata-mata dihitung dari persenjataan, melainkan juga kekuatan militansi prajuritnya. Kondisi itu senada dengan pernyataan pemimpin revolusioner komunis Tiongkok, Mao Zedong yang berkata, "Senjata memang penting dalam sebuah peperangan, tetapi peperangan sangat ditentukan oleh manusia di balik persenjataan." Dari latar belakang tersebut, dapat ditemukan pokok permasalahan, yakni bagaimana membina militansi prajurit sebagai tolok ukur keberhasilan tugas TNI AD dihadapkan dengan manajemen modal manusia?

Adapun nilai guna dari tulisan ini ialah untuk memberikan gambaran bahwa militansi merupakan modal utama kekuatan prajurit, dan sebagai tolok ukur dalam keberhasilan tugas TNI AD. Dengan demikian, dalam pengelolaan sumber daya manusia, diperoleh orang-orang berbakat yang memiliki komitmen dan semangat untuk mengabdikan dirinya pada organisasi TNI AD.

Tulisan ini juga sebagai bahan masukan kepada institusi TNI AD untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya bagi pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset yang tidak berwujud dan merupakan *deterrent power*.

Sebagai acuan, penulis menggunakan beberapa landasan pemikiran sebagai berikut, di antaranya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/474/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2011 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek), Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/XI/2012 Tanggal 1 November 2012 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Mental "Pinaka Baladika", Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Skep/B/430/VII/1992 Tanggal 25 Juli 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/I/2005 Tanggal 5 Januari 2005 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusbintal TNI, dan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi. Penulis menggunakan metode deskripsi analitis dan pendekatan secara empiris yang didukung studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Militansi merupakan modal utama bagi setiap prajurit yang harus tetap tertanam dan terpelihara dalam dirinya. Dengan semangat militansi diharapkan prajurit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjaga dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, TNI lahir berbeda dengan tentara pada sejumlah negara lain, seperti negara tetangga Malaysia, Singapura, ataupun Brunei Darussalam. TNI lahir tidak dibentuk oleh negara, tetapi membentuk dirinya sendiri. Pembentukan tersebut terjadi melalui perjuangan

panjang pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang.

Oleh karena itu, sejak awal pembentukan TNI, Panglima Besar Jenderal Sudirman telah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dasar keprajuritan yang merupakan sendi-sendi kehidupan prajurit, yang pada akhirnya menjadi pedoman hidup prajurit untuk ditaati, diikuti, dan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Itulah sebabnya, sejak lahir TNI pada hakikatnya sudah memiliki karakter dan jiwa militan. Dengan demikian, militansi merupakan sifat kepribadian yang harus melekat pada diri setiap prajurit, dan militansi itu penting untuk menjadikan TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang profesional.

Militansi sangat penting dan pembinaan berfokus pada pentingnya militansi bagi setiap prajurit. Kondisi itu merupakan modal utama untuk dapat mengantarkan prajurit menjadi tentara profesional. Daya tempur itu tidak semata-mata dihitung dari persenjataan, melainkan juga dari kekuatan militansi prajuritnya. Dengan demikian, alutsista merupakan unsur pendukung. Secanggih apa pun peralatan dan persenjataan yang dimiliki, tidak akan berarti apa-apa apabila prajuritnya tidak profesional dan tidak memiliki tekad yang kuat (militan). Oleh karena itu, dengan kekuatan militansi tersebut diharapkan prajurit TNI dapat mengayomi dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

Pada era reformasi ini, bangsa kita, khususnya prajurit TNI sedang menghadapi krisis militansi. Orang terjebak dalam rutinitas. Mereka menjalani hidupnya dengan terpaksa. Kerja pun

dijalani dengan separuh hati. Tak heran banyak hal gagal dijalankan. Pemberantasan korupsi gagal, pengentasan rakyat dari kemiskinan gagal, serta perlawanan pada teror bom juga tersendat. Menjadi militan berarti hidup dengan sebuah nilai, bahkan orang rela mati demi terwujudnya nilai tersebut. Menjadi militan tidak melulu sama dengan menjadi fundamentalis. Nilai hidup seorang militan lahir dari penempatan kritis dan reflektif. Itulah yang kita perlukan sekarang ini. Setiap orang haruslah hidup dengan nilai. Dia perlu memiliki cita-cita tertentu. Cita-cita itu terwujudkan secara nyata dalam nilai yang memengaruhi cara berpikir dan perilakunya. Nilailah yang membuat hidup manusia bermakna.

Sekarang ini, di Indonesia banyak orang hidup tanpa nilai. Mereka tidak memiliki cita-cita luhur sebagai arah hidupnya. Yang menjadi fokus hidup mereka hanyalah keuntungan sesaat. Tak heran, mereka merasa hidupnya hampa. Nilai adalah prasyarat bagi semangat militansi, bahkan militansi dapat diartikan sebagai suatu sikap hidup yang berpegang pada nilai, baik dalam setiap pola pikir maupun perilaku. Orang militan bersedia mati dalam proses mewujudkan suatu nilai. Orang semacam itulah yang semakin hari semakin sedikit di Indonesia.

Militan berbeda dengan fundamentalis. Bagi kaum fundamentalis, kebenaran adalah akar (fundamen) dari suatu ajaran tertentu yang tak lekang oleh berlalunya waktu. Mereka tidak melihat bahwa konteks sudah berubah. Mereka menutup mata pada zaman yang terus berubah. Sementara orang militan hidup dengan sikap kritis. Dengan sikap kritis itu pula mereka memilih nilai apa yang akan mereka perjuangkan. Dengan pola pikir kritis, mereka mencari cara, bagaimana nilai-nilai itu bisa menjadi nyata di dunia. Orang

TANTANGAN KEJUANGAN DAN GLOBALISASI

57



militan hidup dengan prinsip yang teguh, tetapi fleksibel pada tataran perilaku, dalam proses mewujudkan prinsip itu.

Di Indonesia, kita menemukan jauh lebih banyak fundamentalis daripada militan. Sikap militan dengan mudah kita temukan pada sosok "Bapak Bangsa" seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, dan bahkan Tan Malaka. Sementara sekarang ini yang kita temukan adalah sikap fundamentalis, seperti pada fundamentalisme religius ataupun fundamentalisme uang (materi). Itu semua terjadi karena kita jarang sekali berpikir kritis. Waktu kita habis ditelan rutinitas. Kita habis ditelan sikap pengecut di hadapan otoritas, dan kita tidak pernah sungguh-sungguh belajar dari pengalaman.

Akibatnya, sebagai bangsa, kita sulit sekali berubah. Kita seperti diracuni sikap bebal yang takut akan perubahan. Kita mencintai cara berpikir lama. Kita tidak bisa lepas dari pola pikir

klise dan kampungan. Di dalam kereta peradaban, kita pun tertinggal di stasiun nun jauh di sana. Menjadi militan berarti hidup dengan nilai. Menjadi militan berarti mampu dan mau berpikir kritis dalam setiap situasi. Menjadi militan berarti memiliki cita-cita luhur untuk kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun sosial. Menjadi militan berarti berani berkata benar ketika seluruh dunia ketakutan terhadap sosok penguasa yang menindas. Yang terpenting, menjadi militan berarti siap mati untuk mewujudkan cita-cita. Itulah sikap hidup yang semakin langka di dunia.

Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Globalisasi yang berembus dari Barat telah membawa nilai transnasional berupa "demokratisasi, keterbukaan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup" yang melanda semua kehidupan bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian, telah terjadi transisi demokrasi, perubahan

nilai-nilai, serta kebiasaan yang tumbuh di Indonesia walaupun nilai yang baru tersebut belum tentu cocok dengan dasar/falsafah negara dan konstitusi Republik Indonesia, sehingga berpeluang menimbulkan benturan kepentingan yang bisa mengarah pada ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Globalisasi telah menimbulkan tuntutan desentralisasi di Indonesia kian besar sehingga menyebabkan kendali dan pengawasan dari pusat semakin lemah. Kondisi itu dapat memunculkan semangat untuk membentuk negara federal atau semangat separatisme.

Bagi negara yang lemah ekonominya, globalisasi merupakan ancaman karena negara tersebut akan dijadikan sasaran empuk neoliberalisme dan kapitalisme yang tamak. Perusahaan multinasional (MNC) dan NGO/LSM telah menjadi "tentara" baru bagi negara kuat untuk menyerbu negara sasaran yang lemah dan tertinggal. Di tingkat regional, globalisasi telah membangunkan macan ekonomi baru, yakni Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok yang telah dapat membangun ekonominya dengan sangat signifikan di samping macan ekonomi Asia yang semakin maju, yakni Korea Selatan dan Jepang. Di tingkat nasional, kita memiliki masalah dengan masuknya berbagai kepentingan asing ke negeri kita karena letak Indonesia yang strategis dan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Neoliberalisme dan neokapitalisme yang masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia telah menimbulkan dan menyuburkan "neofeodalisme" sehingga telah memacu perilaku berburu kekuasaan (*power-oriented*). Masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah masalah feodalisme dan orientasi kekuasaan yang telah merasuki institusi pemerintahan. Amendemen UUD 1945 telah menimbulkan distorsi dan

menjauh dari spirit dasarnya, terutama perubahan pada pasal 30 yang telah menyebabkan melemahnya semangat penyelenggaraan hankam, berdampak pada turunnya semangat, dan munculnya upaya pelemahan institusi TNI secara sistematis karena ingin menonjolkan supremasi sipil sehingga sampai sekarang Indonesia tidak memiliki *deterrent power*.

Dihadapkan pada kondisi saat ini dan pengaruhnya terhadap lingkungan strategis yang berkembang di bumi pertiwi Indonesia, diharapkan militansi prajurit TNI AD yang menjadi modal utama kekuatan TNI AD dalam menjalankan tugas pokoknya. Militansi itu harus tetap tertanam dan terpelihara dalam dirinya. Dengan semangat militan, diharapkan prajurit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjaga dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diharapkan militansi prajurit yang merupakan *deterrent power* tak berwujud, perlu dipelihara dan ditingkatkan.

Kondisi itu bercirikan, *pertama*, semangat tidak kenal menyerah. Prajurit sebagai garda depan dalam memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memiliki semangat juang dan militansi yang selalu menggelora dan tak pernah padam. Semangat juang pantang menyerah akan tumbuh dan berkembang dalam jiwa sanubari prajurit bila didasari kesadaran dan keyakinan untuk mengedepankan sikap: a) percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Prajurit TNI AD harus memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi setiap tantangan tugas yang dihadapi dengan terus meningkatkan jiwa korsa dan soliditas; b) keyakinan akan kebenaran. Penanaman keyakinan pada

kebenaran dan keadilan lebih berharga daripada kesenangan, kenikmatan, dan lebih berharga daripada memiliki gengsi, nama, kedudukan, dan kekuasaan; c) mengutamakan kewajiban. Setiap tugas yang dipikulkan ke pundak prajurit, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan berpegang teguh pada norma keprajuritan yang mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta siap berbakti kepada negara dan bangsa; d) tidak kenal kompromi. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI harus tegas dan konsisten pada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak kenal kompromi terhadap segala upaya yang mengancam kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Kedua, semangat rela berkorban. Rela berkorban memiliki makna rela menderita sekalipun jiwa dan raga menjadi taruhannya, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks lingkungan tugas, rela berkorban dalam diri prajurit TNI, antara lain: a) tahan uji dalam menghadapi keterbatasan. Bukan berarti sikap pasrah dan menyerah terhadap keadaan, tetapi sebaliknya bersikap dinamis, yakni dengan memanfaatkan peluang dari kondisi penuh keterbatasan untuk mencapai keberhasilan yang ditopang oleh keyakinan bahwa setiap perjuangan senantiasa menuntut pengorbanan; b) memiliki keunggulan moril. Ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dengan dilandasi oleh motivasi yang kuat, semangat juang yang tinggi, hubungan atasan-bawahan yang kondusif, latihan yang berkualitas, serta mekanisme dan prosedur operasional yang jelas; c) kesadaran diri sebagai prajurit Sapta Marga. Prajurit yang telah terikat oleh kode etik prajurit berpegang teguh pada: 1) kesetiaan/loyalitas yang bertumpu pada

kode etik keprajuritan. Oleh karena itu, dalam pengabdian harus berpegang teguh pada Tri Setia, yakni kesetiaan pada amanat Tuhan Yang Maha Esa, amanat kemerdekaan bangsa, dan amanat penderitaan rakyat; 2) menepati janji yakni kesiapsiagaan untuk memenuhi panggilan tugas; 3) melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan balas jasa atau pujian. Dengan demikian, tumbuh sikap rajin, ulet, dan setia dalam menjalankan tugas di mana pun berada; 4) tekad untuk melaksanakan tugas pengabdian melalui berbagai improvisasi sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkup kewenangannya.

Dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis dan sarat dengan perubahan, setiap prajurit dituntut selalu menyadari dan memahami jati diri dalam tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kompleksitas dinamika kehidupan masyarakat global secara langsung ataupun tidak langsung dapat memengaruhi tata kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk prajurit TNI. Sikap hidup konsumtif dan hedonistik akan dapat mengikis nilai-nilai kejujuran prajurit. Oleh karena itu, setiap prajurit harus membentengi jati diri dengan memedomani warisan nilai-nilai kejujuran yang melandasi tumbuhnya rasa tanggung jawab, hati nurani yang selalu menuntut kebenaran, sikap menjunjung tinggi kewajiban dan tekad pengabdian yang diwujudkan dengan sikap ikhlas, rela berkorban, tidak kenal menyerah, tahan menderita, percaya pada kekuatan diri sendiri, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara baik, diperlukan pembinaan militansi prajurit.

Langkahnya ialah, *pertama*, memelihara



militansi prajurit TNI. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pada hakikatnya saat lahir pada diri TNI sudah melekat jati diri, karakter, dan jiwa militan. Kondisi itu perlu dipelihara karena disadari pengaruh globalisasi menerpa sisi-sisi kehidupan prajurit dengan sangat kuat, sehingga dikhawatirkan semangat juang prajurit dapat terkontaminasi dan mengalami degradasi. Prajurit tidak boleh goyah atau mengubah sikap militansi bagi republik tercinta ini. Prasyarat utama militansi prajurit ialah adanya sikap percaya diri dan yakin atas identitas nasional yang tidak kenal kata surut. Prajurit tidak boleh menyerah dalam menjalankan tugas dan untuk mencapai tujuan itu harus konsisten serta berani menghadapi perubahan. Oleh karena itu, untuk memelihara militansi prajurit dapat dilakukan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan manusia/prajurit, karena manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali bila

Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menentukan. Dengan iman, prajurit memiliki keyakinan akan masa depannya (dunia dan akhirat), dan dengan iman pula prajurit memiliki harapan terhadap apa yang diperbuatnya. Dengan demikian, iman menjadi dasar keyakinan prajurit dalam perjuangan hidupnya, sehingga iman akan mendasari perilaku dan amal perbuatan prajurit dalam pengabdian selaku insan hamba Tuhan dan sebagai abdi negara. Berkat keteguhan dan ketegaran iman, Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama anak buahnya berjuang mengusir para penjajah dari bumi peritiwi. Oleh karena itu, agar diperoleh tingkat keimanan dan ketakwaan prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa, setiap prajurit harus memiliki komitmen yang kuat untuk memahami ajaran agama yang diyakininya dengan baik dan benar, menjalankan ajaran agama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan nilai keagamaan dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mengedepankan sikap toleran yang konstruktif dalam kehidupan beragama.

b. Mengamalkan Pancasila. Prajurit TNI meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan harga mati untuk dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga dan mengamalkan Pancasila, militansi prajurit tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, sikap dan perilaku prajurit terhadap ideologi Pancasila harus senantiasa diimplementasikan dengan: 1) meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai ketuhanan dalam sila pertama merupakan nilai religius yang menjiwai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus benar-benar dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) meyakini Pancasila yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai dasar negara, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sudah teruji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya. Dengan demikian, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan prajurit ataupun kehidupan bangsa Indonesia; 3) menyadari bahwa kelestarian, keampuhan, dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus, berupa penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia/prajurit, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan; 4) meyakini kebenaran Pancasila, maka prajurit akan ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial; 5) menyadari sedalam-

dalamnya bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia, maka dengan pengamalan Pancasila, seorang prajurit akan merealisasikan perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Menjiwai Sapta Marga. Sapta Marga merupakan kode etik kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam sikap perilaku serta pengamalannya, bahkan sudah menjadi kepribadian yang senantiasa harus dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendasar dan mendalam terhadap Sapta Marga sehingga tertanam dalam jiwanya bahwa: 1) mahkota tertinggi yang harus diperhatikan oleh seorang prajurit adalah kehormatan. Kehormatan pada hakikatnya ialah fungsi atau peran yang diberikan dan dipercayakan kepadanya untuk menjadi bhayangkara, perisai negara, penegak kemerdekaan dan kedaulatan, serta penjaga hasil-hasil yang telah dicapai dalam perjuangan nasional, terutama untuk melindungi keselamatan hidup rakyat Indonesia; 2) senantiasa memelihara kehormatan prajurit, agar setiap prajurit TNI dapat menunjukkan segala tingkah laku, langkah perbuatan, dan tindak tanduknya sesuai dengan etika dan moral hukum; 3) kesadaran terhadap kehormatan prajurit tidak akan ada artinya apabila kesadaran tersebut hanya melekat di bibir belaka, tanpa adanya suatu ikatan tertentu. Hakikatnya, kehormatan prajurit adalah kepercayaan yang tertinggi dari rakyat untuk menjadi bhayangkara, bukan anggota masyarakat biasa, tetapi menjadi anggota masyarakat tertentu, yaitu masyarakat prajurit; 4) menyadari bahwa disiplin merupakan ciri khas untuk membedakan antara seorang prajurit dan seseorang yang bukan prajurit, antara bhayangkara dan bukan bhayangkara. Disiplin

itulah yang memelihara tegaknya sendi kode etik dalam Sapta Marga yang membina seluruh kepribadian seorang prajurit untuk mengatur kehidupannya, menempa watak dan semangat keprajuritannya; 5) menyadari bahwa prajurit TNI demi kehormatannya akan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia akan bertingkah laku secara wajar, sesuai dengan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Tingkah laku yang wajar itu dapat terlaksana, berkat adanya disiplin yang hidup dan penuh kesadaran, untuk apa dia bertindak, berbuat dan mengabdikan; 6) meyakini bahwa semangat adalah kekuatan spiritual yang terpancar dari dalam tubuh jasmaniah seorang prajurit, memancar karena keyakinannya, tekadnya, karena disiplinnya yang berdasarkan kesadaran. Kekuatan spiritual yang memancar dengan irama tinggi itu akan melahirkan perbuatan patriotik, heroik, dan tingkah laku yang disertai keikhlasan, kerelaan, serta kegembiraan, sehingga memungkinkan tumbuhnya kemampuan dan kesanggupan yang tiada tara. Semangat itu pulalah yang harus dibina dalam bentuk-bentuk tradisi keprajuritan yang tersirat dalam Sapta Marga. Semangat juang prajurit TNI diharapkan dapat menjadi tonggak kemegahan dan keabadian Pancasila, karena Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan prajurit TNI hidup di dalam lingkungannya untuk berbakti, berjuang, dan mengabdikan.

d. Berpegang teguh pada Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit merupakan janji, sumpah setia yang disakralkan oleh seorang prajurit yang langsung berhubungan dengan Yang Maha Pencipta Alam Semesta. Konsekuensi janji menuntut adanya pelaksanaan yang sesuai dengan janji itu. Apabila janji tidak ditunaikan, hal itu akan mendapat

sanksi dari Yang Mahakuasa. Agar janji tetap pada kaidahnya, prajurit harus menyadari bahwa: 1) mengucapkan sumpah/janji yang diikrarkan prajurit merupakan janji yang mengikat kuat, tidak hanya kepada institusi tetapi mengikat pula terhadap Yang Maha Pencipta; 2) sumpah/janji yang sudah terpatrit di dalam dada prajurit, menuntut konsekuensi tanggung jawab untuk dapat menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) keteguhan seorang prajurit dapat dipelihara dan ditingkatkan dengan cara memegang teguh disiplin tentara; 4) tanggung jawab prajurit ialah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi dan konstitusi negara Republik Indonesia; 5) untuk tetap terjamin dan terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa, sikap tunduk dan patuh kepada undang-undang dan ideologi negara Republik Indonesia merupakan syarat mutlak agar TNI tetap utuh; 6) janji harus dibayar dengan cara merealisasikan dan memegang teguh rahasia tentara.

e. Mengimplementasikan Delapan Wajib TNI. Delapan Wajib TNI merupakan panduan etika/moral bagi prajurit. Melalui panduan ini diharapkan interaksi antara prajurit dan rakyat berjalan sesuai dengan etika moral yang berlaku, di samping untuk terwujudnya harmonisasi dan keteladanan prajurit. Agar eksistensi prajurit tetap terjaga, Delapan Wajib TNI perlu dipedomani dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap sebagai berikut: 1) menyadari bahwa moral merupakan soko guru dalam interaksi antara prajurit dan rakyat, serta sebagai anutan dalam menjalankan tugas; 2) menyadari bahwa kepatuhan prajurit

terhadap pemimpin merupakan tuntutan yang mendasar bagi keberhasilan tugas; 3) menyadari untuk senantiasa menjadi contoh/teladan dalam sikap dan kesederhanaan; 4) menyadari untuk tidak sekali-kali menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat; 5) menyadari untuk dapat menjadi contoh sekaligus memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat.

Kedua, meningkatkan militansi prajurit. Setelah memelihara militansi prajurit, langkah selanjutnya ialah bagaimana meningkatkan militansi prajurit, agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tuntutan dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan militansi harus dilaksanakan secara terus-menerus agar mental prajurit selalu dalam kondisi baik, dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme merupakan bagian dari jati diri TNI, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, dan diperhatikan kesejahteraannya. Sementara profesionalisme ialah penguasaan setiap prajurit atas alat utama sistem senjata (kemahiran teknis dan taktis), memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap profesinya, memiliki soliditas dan jiwa korsa yang kuat. Agar kondisi tersebut terwujud, yang perlu dilakukan ialah sebagai berikut: 1) meningkatkan latihan agar prajurit memiliki keterampilan dan ahli (mahir) dalam bidangnya; 2) memelihara kebiasaan (etos) melaksanakan pekerjaan secara maksimal, benar, dan tepat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; 3) memiliki motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan rasa bangga, cinta, dan hormat terhadap profesi sebagai prajurit TNI; 4) memperhatikan

dan memprioritaskan kualitas moral dan semangat kejuangan yang tinggi; 5) membina dan memelihara jiwa korsa, soliditas; 6) meningkatkan kemampuan yang andal dan kredibel.

b. Meningkatkan moril prajurit. Untuk meningkatkan militansi, aspek moril prajurit harus diperhatikan, karena moril merupakan salah satu kekuatan dalam diri prajurit yang dapat membangkitkan dan menggerakkan motivasi serta semangat dalam menjalankan tugas. Agar motivasi dan semangat juang prajurit baik, perlu ada upaya untuk meningkatkan moril prajurit, dengan pendekatan tiga aspek sebagai berikut:

1) aspek watak prajurit yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan, meningkatkan sikap ulet dan tabah untuk mau belajar secara mandiri, dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kejuangan; 2) aspek nilai dan norma prajurit, yaitu meningkatkan keyakinan terhadap nilai dan semangat kepahlawanan, meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan motivasi dan menanamkan jiwa korsa; 3) aspek kehormatan prajurit, yaitu meningkatkan budaya untuk selalu bersikap ramah tamah dan sopan santun, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan semangat dan jiwa ksatria serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan budaya malu, menumbuhkan sikap jujur, benar dan adil, serta meningkatkan sikap rasa tanggung jawab dan kesadaran.

c. Meningkatkan patriotisme. Pelaksanaan tugas yang dipikul oleh negara terhadap TNI ke depan semakin berat, termasuk tantangan yang dihadapi. Tidak hanya dalam konteks perlengkapan alutsista yang modern, tetapi ada yang lebih berat, yaitu tantangan budaya dan modal

kuat negara-negara maju. Untuk tetap terpaterinya semangat juang dan militansi prajurit, perlu dibangun kesadaran yang kuat dalam diri prajurit melalui pembinaan dengan cara sebagai berikut: 1) menanamkan keyakinan setiap prajurit bahwa segala upaya yang dilakukan oleh prajurit demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan ibadah dan dalam menjalankan tugas tersebut prajurit tidak melupakan Sang Maha Pencipta; 2) menginternalisasikan nilai-nilai perjuangan bangsa terhadap prajurit, merupakan pewarisan yang harus dilakukan agar prajurit tidak lengah dan lemah dalam menghadapi dan menjalankan tugas ke depan; 3) menanamkan sifat rela berkorban yang mendasar bagi prajurit agar ia tetap dapat dan rela mengabdikan diri kepada negara dan bangsa.

d. Menjaga soliditas. Soliditas pada dasarnya ialah sebuah kekuatan dan ketahanan saat dihadapkan dengan berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, serta munculnya berbagai bentuk perubahan. Secara makro, makna soliditas di samping kekuatan juga bermakna ikatan, keterpaduan, yang dalam istilah militer disebut jiwa korsa. Selanjutnya soliditas yang bersifat kejiwaan atau motivasi yang muncul dari dalam diri ialah rasa senasib dan sepenanggungan dalam bentuk tumbuhnya jiwa korsa (*esprit de corps*), memiliki kebanggaan satuan/profesi, mau dan sanggup berkorban, keterikatan batin dan kesadaran akan persatuan, kebersamaan, loyalitas, dan memegang teguh asas serta tujuan yang telah disepakati bersama, wujud soliditas tak mudah pecah atau dipisahkan karena ada unsur moral di dalamnya. Dari kondisi tersebut, dapatlah diambil kekuatan untuk mewujudkan soliditas dalam satuan.

Ada beberapa hal yang harus dipegang untuk dapat dijadikan kata kunci dalam membangun soliditas TNI di satuan-satuan, antara lain 1) adanya keterbukaan dalam satuan sehingga semua anggota mengetahui kondisi satuan dan saling percaya antara pimpinan dan anggota yang dipimpin, pihak masing-masing tidak melakukan langkah-langkah di luar instruksi/komando yang telah ditetapkan oleh pimpinan, sehingga semua tindakan terkontrol dan terkoordinasi dengan baik; 2) siap menerima kritik dan saran yang konstruktif dan membangun dalam alam keterbukaan, manakala sesuatu belum diputuskan sehingga semua individu dapat berperan dalam suatu organisasi; 3) sikap konsisten dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Meskipun berbagai cobaan dan silang pendapat terjadi, kita tetap harus mengutamakan kepentingan negara dan keutuhan bangsa, serta tetap tegaknya NKRI; 4) loyalitas dan kesetiaan prajurit TNI adalah mutlak dan hanya ditujukan kepada negara, bukan kepada kelompok atau golongan tertentu atau kepada pemegang kekuasaan tertentu.

PENUTUP

Sebagai penutup dari esai ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa militansi merupakan modal utama kekuatan prajurit dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan tugas TNI AD. Pada kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan strategis yang berkembang di bumi pertiwi Indonesia, diharapkan militansi prajurit TNI AD yang merupakan modal utama kekuatan TNI AD dalam menjalankan tugas pokoknya, harus tetap tertanam dan terpelihara dalam dirinya. Dengan semangat militansi diharapkan prajurit dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik dalam menjaga dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diharapkan militansi prajurit perlu dipelihara dan ditingkatkan, yaitu semangat tidak kenal menyerah, semangat rela berkorban dan tahan menderita, percaya pada kekuatan diri sendiri serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Dari pembahasan tersebut, bersama ini disarankan kepada semua unsur pimpinan/komandan satuan, *pertama*, untuk memelihara dan meningkatkan militansi prajurit di satuannya secara terus-menerus. *Kedua*, perlu dilakukan kembali upaya untuk memasyarakatkan dan menyosialisasikan Pancasila, jati diri bangsa, dan wawasan kebangsaan di wilayah masing-masing.

Demikianlah tulisan ini dibuat untuk mengingatkan kita semua sebagai prajurit TNI AD agar tetap tertanam dan terpelihara militansi prajurit yang merupakan aset tidak berwujud TNI AD, guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/474/VII/2012 tanggal 10 Juli 2011 tentang Doktrin TNI” Tri Dharma Eka Karma (Tridek)
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Mental “ Pinaka Baladika”.
4. Surat keputusan Menhankam / Pangab Nomor Skep/B/430/VII/1992 tanggal 25 Juli 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental TNI.
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pusbintal TNI.
6. Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.
7. Paparan para alumni Akademi Militer tahun 1960 sampai dengan tahun 1975, pada sarasehan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2007 di Akmil. Topik bahasan masing-masing alumni seputar Wawasan Kebangsaan, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tugas, Peran dan Postur TNI-AD, Rekrutmen Taruna Akmil, Kurikulum Akmil, kesejahteraan prajurit TNI-AD.
8. Sumber : Wikipedia.com (Drs. I Made Worda Negara, M.Pd.H, Membangun Prajurit TNI Yang Solid, Militansi dan Memiliki Semangat Jiwa Korsia)
9. www.academi HUMAN CAPITAL HUMAN.
10. madewordanegara.blogspot.com Darma Wacana Hindu: Membangun Prajurit TNI yang Solid,Miltansi dan memiliki semangat jiwakorsa.

BIODATA PENULIS



Kolonel Czi Drs. Burlian Sjafei, Lahir di Bogor pada tanggal 9 November 1966. Pamen berpangkat Kolonel yang saat ini bertugas di Seskoad ini pernah menjalani pendidikan umum mulai Pendidikan Umum : SD (1979); SMP (1982); SMA (1985); PT (1994). Adapun Pendidikan Militer beliau dimulai dengan pendidikan Akmil (1988); Sussarcab Zi (1988); Suslapa I (1994); Suslapa II (1997); dan Seskoad (2003).

Penugasan yang pernah diikuti yaitu Operasi Jaringan Aceh (1992/1993); Ops Pengamanan Aceh (2000). Kemudian pengalaman jabatan beliau dimulai dari jabatan Danton Yonzipur Dam I/BB (1988); Danton III Ki Zipur A Dam I/BB (1989); Danton II Ki Zipur C Dam I/BB (1990); PS. Danki Zipur C Dam I/BB (1991); Danki C Yonzipur Dam I/BB (1992); Pasi Ops Dim, 0212 (1996); Kasi Diktuk Bakdiku Bangum (1998); Wadan Yonzipur I/BB (1999); Kazibangmil Denzibang 6/Zidam I/BB (2001); Kazibangmil Zidam IM (2002); Pabandya Logwil Slogdam IV/Dip (2003); Kazi Akmil (2004); Dandim 0822/Dam V/Brw (2007); Waaslog Kasdam IM (2009); Kasubdis Binfung Disjarahad (2011); Dosen Madya Seskoad (2013); Patun Seskoad (2015); dan sekarang menjadi Dosen Utama Seskoad.